JURNAL ABDIMAS INDONESIA Vol. 5, No. 4, 2025
E-ISSN 2797-2887
Copyright © 2025 The Author(s)

# Implementasi Nilai-nilai Teologi Kristen dalam Pendampingan Pemerintah Daerah Mamuju untuk Pembangunan Infrastruktur

**Semuel Linggi Topayung**
Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar (SETIA) Jakarta, Indonesia
semueltopayung@yahoo.com

**Abstrak**:

Artikel ini memaparkan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dijalankan secara mandiri oleh seorang akademisi Kristen melalui pendampingan strategis kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga bulan, dengan pendekatan non-formal namun sistematis. Fokus utama kegiatan adalah memfasilitasi hubungan kelembagaan antara pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui pertemuan antara Bupati Mamuju dan pejabat struktural di kementerian. Selain itu, penulis turut memberikan pengarahan strategis kepada sejumlah kepala dinas teknis di tingkat kabupaten serta melakukan observasi langsung terhadap kondisi infrastruktur di Kecamatan Kalumpang. Metode pelaksanaan pengabdian ini mencakup pendampingan strategis melalui diplomasi kebijakan serta observasi partisipatif di lapangan. Data pengabdian terdiri atas dokumen perencanaan teknis, notula pertemuan, dan temuan observasi lapangan yang diperoleh melalui wawancara non-formal dan dokumentasi partisipatif. Seluruh data tersebut dianalisis dengan pendekatan reflektif dan etis yang berlandaskan kerangka teologis, sehingga hasil pengabdian tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai integralitas, keadilan, dan pelayanan dalam iman Kristen. Tidak terdapat aktivitas pelatihan atau sosialisasi massal dalam kegiatan ini, melainkan penekanan pada komunikasi strategis, pembacaan situasi kelembagaan, dan refleksi etis. Nilai-nilai teologi Kristen seperti integritas, pelayanan, dan keadilan sosial menjadi landasan dalam proses pendampingan. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa peran akademisi, meskipun dijalankan secara individual, tetap memiliki kontribusi signifikan dalam mendorong kolaborasi antarlembaga dan menyuarakan etika pelayanan publik. Temuan ini membuka ruang bagi keterlibatan praktisi teologi dalam pembangunan yang partisipatif dan bermartabat.

**Kata Kunci:** *Teologi Kristen, pendampingan strategis, infrastruktur, etika pelayanan, Kabupaten Mamuju*

## Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur memegang peranan penting dalam mendorong kemajuan ekonomi dan sosial suatu daerah. Infrastruktur yang baik, seperti jalan, jembatan, sistem air bersih, dan fasilitas umum lainnya, menjadi prasyarat utama bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pemerataan pembangunan antar wilayah. Ketersediaan infrastruktur memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga. Dalam konteks pembangunan nasional, perhatian besar dialokasikan pada pengembangan infrastruktur agar pertumbuhan dapat dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat(Kementerian PPN/Bappenas, 2020).

Copyright © 2025 The Author(s)

Kabupaten Mamuju, yang berada di Provinsi Sulawesi Barat, merupakan salah satu wilayah yang tengah fokus dalam memperbaiki kondisi infrastrukturnya. Wilayah ini memiliki karakteristik geografis yang cukup menantang, dengan wilayah pegunungan dan daerah terpencil yang membutuhkan penanganan khusus. Belum lama ini, bencana alam seperti gempa bumi juga menyebabkan kerusakan serius pada sejumlah fasilitas umum dan sarana infrastruktur, sehingga memperlambat laju pembangunan dan pelayanan publik. Kecamatan Kalumpang menjadi salah satu area yang paling terdampak dengan kondisi fisik yang sulit dijangkau serta infrastruktur dasar yang masih jauh dari memadai. Meski demikian, upaya pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan tersebut tidaklah mudah. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam merealisasikan program pembangunan infrastruktur secara mandiri. Selain itu, proses administrasi untuk memperoleh bantuan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), juga menghadapi berbagai tantangan birokrasi dan koordinasi lintas instansi. Tidak jarang, keterbatasan sumber daya manusia yang berpengalaman di tingkat daerah memperlambat proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Situasi ini membutuhkan intervensi yang mampu menghubungkan berbagai pihak secara efektif agar percepatan pembangunan dapat terwujud(Fitriani, 2021).

Dalam hal ini, keterlibatan akademisi, terutama yang memiliki dasar nilai teologis Kristen, dapat memberikan kontribusi bermakna melalui kegiatan pendampingan. Bentuk pengabdian ini melampaui sekadar kegiatan pelatihan atau penyuluhan teknis, melainkan juga mencakup pendampingan strategis yang mengedepankan nilai-nilai etika dan integritas. Nilai-nilai teologi Kristen, seperti rasa tanggung jawab sosial, pelayanan tanpa pamrih, serta komitmen pada keadilan, menjadi fondasi moral yang dapat memperkaya proses pendampingan sehingga tidak sekadar administratif, tetapi juga mencerminkan sebuah kesaksian iman yang nyata. Nilai tanggung jawab sosial dalam tradisi Kristen mengajak setiap individu untuk aktif terlibat dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam konteks Alkitab, umat dipanggil untuk memperhatikan kaum yang lemah dan menegakkan keadilan sosial. Ajaran Yesus Kristus juga menekankan pelayanan yang tulus dan penuh kasih kepada sesama tanpa mengharapkan imbalan duniawi. Ketika prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam pengabdian kepada masyarakat, akademisi tidak hanya berperan sebagai pemberi pengetahuan, tetapi juga agen perubahan sosial yang membawa misi spiritual ke ranah publik.

Selama tiga bulan di Kabupaten Mamuju, pendampingan yang dilakukan mencakup fasilitasi pertemuan antara Bupati dengan pejabat Kementerian PUPR untuk mempercepat proses pengajuan bantuan dana pembangunan, pengarahan teknis kepada kepala dinas terkait di tingkat kabupaten, serta observasi langsung di Kecamatan Kalumpang guna memahami kondisi lapangan secara mendalam. Pendekatan kerja yang diterapkan bersifat kolaboratif dan mengedepankan komunikasi yang terbuka dan efektif antara pemerintah daerah dan pusat. Selain itu, pendampingan dilakukan dengan sikap profesional yang berpijak pada nilai-nilai etis Kristen sehingga menumbuhkan kepercayaan dan semangat gotong-royong di antara para pemangku kepentingan. Salah satu hal yang menonjol dari kegiatan ini adalah sifatnya yang personal, dilakukan oleh akademisi secara mandiri tanpa mewakili institusi tertentu. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa kontribusi terhadap pembangunan tidak harus selalu bersifat kelembagaan, melainkan dapat berasal dari individu yang memiliki komitmen tinggi dan tanggung jawab sosial. Pendampingan yang dilakukan secara pribadi ini memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan strategi dengan kebutuhan lapangan dan kondisi

pemerintah daerah. Dengan demikian, peran akademisi menjadi lebih luas, tidak hanya sebagai pengajar atau peneliti, tetapi juga sebagai fasilitator pembangunan yang mengintegrasikan keahlian teknis dan nilai-nilai moral.

Artikel ini bertujuan untuk mendokumentasikan dan menganalisis hasil pengabdian masyarakat tersebut serta menyoroti bagaimana nilai-nilai teologi Kristen dapat diterapkan secara konkret dalam pendampingan pembangunan infrastruktur di daerah. Harapan ke depan adalah agar tulisan ini dapat menginspirasi akademisi lain, khususnya yang berlatar belakang teologi dan pelayanan, untuk berkontribusi secara aktif dalam pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial dan nilai-nilai iman. Lebih jauh, artikel ini membuka ruang diskusi tentang peran penting pendekatan teologis dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah tertinggal.

## Metode Pelaksanaan

A. Durasi dan Lokasi Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung selama tiga bulan, yaitu sejak Februari hingga April 2025. Lokasi utama kegiatan berada di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kebutuhan mendesak akan penguatan infrastruktur pasca bencana dan keterbatasan akses pemerintah daerah dalam menjalin relasi efektif dengan kementerian teknis, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Meski cakupan secara administratif adalah seluruh wilayah kabupaten Mamuju, fokus kegiatan terpusat pada satu kecamatan, yakni Kecamatan Kalumpang. Wilayah ini secara geografis cukup terisolasi dan memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal konektivitas jalan dan sarana dasar lainnya.

Penempatan waktu selama tiga bulan juga disesuaikan dengan dinamika kegiatan birokrasi pemerintahan dan kalender kerja lembaga pusat. Sebagai seorang akademisi independen, peneliti menjalin koordinasi dengan Bupati Kabupaten Mamuju dan sejumlah pejabat teknis di pusat, guna menjembatani kebutuhan daerah dan peluang dukungan dari kementerian terkait.

B. Pendekatan dan Strategi Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan partisipatif dan reflektif, berakar dari prinsip-prinsip teologi Kristen yang menekankan pada tanggung jawab sosial, keadilan struktural, dan peran aktif dalam menciptakan tatanan masyarakat yang bermartabat. Pendekatan ini bukan hanya administratif dan teknis, melainkan mencakup dimensi etik dan spiritual yang mewarnai setiap proses pengambilan keputusan publik.

Kegiatan diawali dengan identifikasi masalah di tingkat daerah, khususnya mengenai kesenjangan antara kebutuhan pembangunan infrastruktur dengan ketersediaan anggaran dan akses politik. Peneliti kemudian memfasilitasi pertemuan strategis antara Bupati Mamuju dengan pejabat tinggi di Kementerian PUPR, dalam hal ini Kepala Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Pertemuan ini merupakan bagian penting dari diplomasi kebijakan yang bertujuan memperkuat posisi tawar pemerintah daerah agar dapat memperoleh alokasi program nasional secara adil dan tepat sasaran. Langkah selanjutnya adalah memberikan arahan teknis dan strategis kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mamuju beserta jajaran dinas terkait. Arahan ini mencakup perumusan prioritas pembangunan, penyesuaian program dengan kebijakan kementerian, serta penyusunan narasi proposal pembangunan yang sesuai dengan terminologi dan kerangka

Copyright © 2025 The Author(s)

kerja pusat. Dalam pendekatan ini, peneliti menempatkan diri sebagai fasilitator dan konsultan strategis, bukan sebagai pelatih atau instruktur teknis.

Selain interaksi di tingkat birokrasi, kegiatan juga dilengkapi dengan kunjungan lapangan ke Kecamatan Kalumpang. Observasi ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi infrastruktur jalan, jembatan, dan akses pelayanan publik. Temuan di lapangan ini kemudian diintegrasikan ke dalam narasi kebijakan yang dibawa kembali ke forum-forum pertemuan tingkat kabupaten dan kementerian. Dalam konteks ini, proses pendampingan tidak hanya berbasis data, tetapi juga dimaknai sebagai tindakan profetis yang merepresentasikan keprihatinan moral terhadap situasi keterbelakangan dan ketimpangan pembangunan.

C. Kerangka Teologis sebagai Landasan Etik

Sebagai bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dari perspektif akademisi Kristen, seluruh proses dan langkah yang diambil berakar pada pemahaman mendalam bahwa iman Kristen tidak hanya sekadar keyakinan personal, tetapi harus diwujudkan secara nyata dalam konteks kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Dalam tradisi teologi publik Kristen, keberadaan orang percaya tidak dapat dibatasi hanya dalam lingkup ibadah atau kehidupan spiritual secara individual, melainkan harus aktif hadir dan berperan dalam tataran sistemik dan struktural yang membentuk kesejahteraan dan keadilan sosial bersama(Michael Kinnamon & Brian Cope, 1997). Oleh sebab itu, pendampingan dan pelayanan yang diberikan bukan sekadar bersifat teknis atau administratif, melainkan juga membawa dimensi etis yang menuntut keadilan dan pemberdayaan, terutama bagi daerah-daerah yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam wacana pembangunan nasional.

Prinsip-prinsip etika yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan ini mencakup nilai-nilai integritas yang tinggi, pelayanan tanpa pamrih, dan keberpihakan nyata kepada komunitas yang selama ini terpinggirkan. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut, pendampingan diharapkan tidak hanya berkontribusi pada aspek fisik pembangunan, tetapi juga memperkuat posisi sosial politik daerah dalam menentukan nasibnya sendiri. Pembangunan sejatinya bukanlah arena untuk meraih keuntungan pribadi atau kelompok, melainkan merupakan sarana strategis untuk membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat terhadap sumber daya yang adil dan merata, serta menciptakan kesempatan yang setara dalam berbagai bidang kehidupan. Pembangunan dalam perspektif iman bukanlah tujuan akhir itu sendiri, melainkan sebuah instrumen penting untuk mengangkat harkat dan martabat manusia serta mewujudkan keadilan sosial secara konkret(Jürgen Moltmann, 1993). Melalui lensa teologis ini, setiap upaya pembangunan tidak hanya diukur dari aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga dari dampaknya dalam membentuk masyarakat yang berkeadilan, damai, dan saling menghargai. Pendekatan etis seperti ini mengajak para pelaku pembangunan, terutama yang berakar dari iman Kristen, untuk mengedepankan nilai kasih dan keadilan sebagai fondasi utama dalam setiap kebijakan dan tindakan.

Dengan demikian, kerangka teologis ini menjadi landasan yang kuat dalam merumuskan sikap dan tindakan selama pendampingan berlangsung. Ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pelayanan dan pembangunan harus berorientasi pada tujuan yang lebih besar, yakni membangun masyarakat yang tidak hanya sejahtera secara material, tetapi juga bermartabat dan adil secara sosial. Melalui penerapan nilai-nilai ini, akademisi Kristen tidak hanya memberikan kontribusi teknis, tetapi juga menyuarakan panggilan etis yang mendalam untuk menghadirkan Kerajaan Allah di tengah dunia melalui karya nyata di ranah publik.

D. Model Partisipasi Tanpa Intervensi Teknis Langsung

Salah satu karakter khas dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pendekatan partisipatif yang dilakukan tanpa keterlibatan langsung dalam pelatihan teknis maupun penyelenggaraan kegiatan formal seperti seminar, lokakarya, atau pelatihan kepada masyarakat dan aparatur sipil negara. Pilihan pendekatan ini bukanlah karena keterbatasan sumber daya atau waktu, melainkan didasarkan pada analisis kebutuhan di lapangan yang menuntut intervensi strategis dalam bentuk pendampingan nonformal. Fokus utamanya terletak pada penguatan komunikasi lintas sektor, penyampaian ide-ide strategis, serta dukungan untuk memperkuat posisi pemerintah daerah dalam kerangka hubungan pusat dan daerah.

Model ini menjadi signifikan mengingat tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah bukan semata persoalan teknis, melainkan kurangnya akses terhadap jejaring strategis dan rendahnya pemahaman terhadap prosedur administratif yang berlaku di tingkat kementerian. Dalam banyak kasus, pejabat daerah sebenarnya memiliki kapasitas teknis yang memadai untuk menyusun program dan merancang pembangunan. Namun, tantangan muncul ketika mereka harus menerjemahkan kebutuhan lokal ke dalam bahasa administratif yang sesuai dengan logika birokrasi kementerian pusat. Akibatnya, banyak proposal pembangunan yang secara substansi baik namun ditolak karena tidak memenuhi standar formal kementerian.

Dalam konteks inilah, kehadiran peneliti sebagai fasilitator nonformal menjadi sangat penting. Peran ini tidak berada dalam ranah instruksional atau teknokratik, melainkan sebagai mitra diskusi strategis yang membantu membuka ruang komunikasi, menjembatani logika daerah dengan kebijakan pusat, serta mendorong dialog yang lebih efektif antara berbagai aktor pembangunan. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi ketegangan antara tingkat lokal dan pusat, tetapi juga membangun kepercayaan dan rasa saling memahami di antara pemangku kepentingan. Lebih jauh, model partisipasi ini menunjukkan bahwa pengabdian masyarakat tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk kegiatan pelatihan atau pemberdayaan langsung. Dalam situasi tertentu, kontribusi yang paling dibutuhkan justru adalah kehadiran aktor yang mampu memfasilitasi komunikasi strategis dan membuka akses terhadap jaringan yang sebelumnya tertutup. Dengan menjadi perantara yang memahami dinamika dua arah—baik dari sisi kebijakan nasional maupun kondisi lokal—peneliti berperan sebagai katalisator transformasi kebijakan yang berbasis kebutuhan riil masyarakat. Pendekatan seperti ini juga selaras dengan prinsip pembangunan partisipatif yang menekankan pentingnya kolaborasi dan pengakuan terhadap kapasitas lokal. Dalam pengabdian ini, kepala daerah dan jajaran dinas tetap menjadi aktor utama dalam menyusun dan melaksanakan agenda pembangunan, sementara peneliti hadir sebagai pendukung yang menguatkan kapasitas advokasi mereka di tingkat pusat. Artinya, kegiatan ini bukan mengambil alih fungsi teknis daerah, melainkan melengkapi upaya yang telah mereka jalankan dengan sentuhan strategis yang bersifat lintas sektor dan berbasis relasi. Model ini juga relevan diterapkan di banyak daerah lain yang menghadapi tantangan serupa, yakni keterbatasan dalam memahami alur kebijakan nasional dan membangun jejaring lintas instansi. Dengan pendekatan yang menghormati otonomi lokal namun tetap mendampingi dalam proses komunikasi lintas birokrasi, pengabdian masyarakat menjadi lebih adaptif dan sesuai dengan konteks kebutuhan riil di lapangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model partisipasi tanpa intervensi teknis langsung ini bukan hanya efisien dalam konteks tertentu, tetapi juga strategis dalam menciptakan dampak jangka panjang. Ini memperlihatkan bahwa keberhasilan

Copyright © 2025 The Author(s)

pengabdian masyarakat tidak hanya ditentukan oleh jumlah pelatihan atau kegiatan yang dilakukan, melainkan oleh kualitas interaksi, relevansi strategi, dan kemampuan membangun jembatan komunikasi antara berbagai lapisan pemerintahan.

E. Refleksi Etis atas Proses Pelaksanaan

Proses pelaksanaan kegiatan pengabdian ini membuka ruang reflektif yang penting mengenai bentuk dan pendekatan pelayanan akademik di tengah konteks pembangunan daerah. Ditemukan bahwa model pengabdian yang menggabungkan strategi pendampingan teknis dengan refleksi teologis-etis memberikan kontribusi yang signifikan, bukan hanya dalam aspek administratif, tetapi juga dalam membangun kesadaran akan pentingnya nilai-nilai moral dan spiritual dalam tata kelola publik. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa keterlibatan akademisi Kristen tidak harus terbatas pada lingkup pendidikan formal atau wacana keilmuan di ruang kuliah, melainkan dapat meluas menjadi agen transformasi sosial melalui keterlibatan langsung dalam proses kebijakan publik dan pelayanan masyarakat.

Kegiatan ini sekaligus mempertegas bahwa pendekatan yang bersifat relasional dan dialogis lebih efektif dalam menjawab tantangan pembangunan dibandingkan pendekatan yang semata-mata prosedural. Keberhasilan mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan kementerian teknis tidak hanya bergantung pada kelengkapan dokumen administratif, tetapi juga pada kemampuan membangun komunikasi yang beretika, saling percaya, dan berpihak pada kepentingan bersama. Dalam konteks inilah, nilai-nilai Kristen seperti integritas, kasih, dan keadilan menemukan tempat aktualnya dalam ruang-ruang kebijakan dan pelayanan publik. Selain itu, keterlibatan akademisi dalam pengabdian ini memperlihatkan pentingnya peran sebagai *critical partner* bagi pemerintah daerah. Peran ini bukan dimaksudkan untuk mengontrol atau menggurui, tetapi untuk menyumbangkan wawasan kritis, perspektif etik, dan kapasitas teknis yang dapat memperkuat posisi daerah dalam sistem pembangunan nasional. Ketika akademisi hadir dengan semangat pelayanan, bukan sekadar dengan pendekatan akademik yang kaku, maka dampak yang dihasilkan pun menjadi lebih menyentuh aspek kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dengan demikian, refleksi atas proses pelaksanaan ini menunjukkan bahwa model pengabdian yang berakar pada iman, dipadukan dengan strategi pendampingan yang sensitif terhadap kebutuhan lokal, dapat menjadi pola pelayanan yang relevan dan kontekstual. Ini merupakan kontribusi nyata dari dunia akademik yang tidak hanya mencerdaskan secara intelektual, tetapi juga membentuk kesadaran sosial dan spiritual baik di tingkat individu maupun kelembagaan. Model seperti ini layak dikembangkan lebih luas sebagai bentuk praktik pelayanan publik yang tidak terlepas dari nilai-nilai etis dan panggilan iman yang transformatif.

F. Metode Pelaksanaan

Pendampingan Strategis dan Observasi Partisipatif: Metode pengabdian ini mengombinasikan *pendampingan strategis* (diplomasi kebijakan) dan *observasi partisipatif* sebagai inti intervensi sehingga tindakan akademis tidak hanya teknis tetapi juga bermuatan etis; secara operasional, pendampingan strategis diwujudkan melalui fasilitasi pertemuan antarlembaga, penyusunan bahan advokasi, dan simulasi penyampaian proposal, sedangkan observasi partisipatif melibatkan penelusuran kontekstual di lapangan dan keterlibatan aktor lokal dalam pengumpulan data. Data pengabdian meliputi dokumen perencanaan teknis, notula pertemuan, dan temuan observasi lapangan yang diperoleh melalui wawancara non-formal dengan kepala daerah,

kepala dinas, tokoh desa, serta dokumentasi partisipatif (foto, catatan lapangan, dan surat-menyurat administrasi). Analisis dilakukan dengan pendekatan reflektif dan etis—membaca data bukan sekadar untuk rekomendasi teknis tetapi melalui lensa teologi praktis: menafsirkan hasil dalam kerangka integritas, keadilan, dan pelayanan sehingga setiap temuan diuji terhadap bagaimana kebijakan dan praktik pembangunan dapat merealisasikan panggilan iman yang transformatif—mengubah struktur ketimpangan, memperkuat suara komunitas tertinggal, dan mengintegrasikan moralitas publik ke dalam proses pengambilan keputusan.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Fasilitasi Pertemuan Pemerintah Daerah dengan Kementerian PUPR

Salah satu capaian penting dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah keberhasilan peneliti dalam memfasilitasi pertemuan strategis antara Bupati Mamuju dengan pejabat senior dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pertemuan tersebut bukan sekadar agenda formal atau seremonial, melainkan sebuah momen krusial untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat, khususnya dalam menanggapi kebutuhan mendesak pembangunan infrastruktur yang sangat diperlukan oleh Kabupaten Mamuju. Hal ini sejalan dengan pandangan Sihombing (2021) bahwa sinergi antara akademisi dan pemangku kebijakan dapat membuka ruang kolaboratif untuk percepatan pembangunan di daerah tertinggal(Sihombing, 2021).



Gambar 1. Pertemuan Bupati dengan Kepala Pembangunan Infrastruktur kementerian PU

Peran peneliti sebagai fasilitator dilakukan dengan pendekatan yang mengedepankan keseimbangan antara profesionalisme dan pemahaman kontekstual terhadap kondisi birokrasi pusat serta urgensi persoalan infrastruktur di daerah. Pendekatan ini memungkinkan dialog berjalan secara efektif, di mana kedua pihak dapat saling memahami batasan, prioritas, serta peluang yang ada untuk percepatan pembangunan. Fasilitasi ini menjadi sarana yang strategis untuk menyampaikan aspirasi pemerintah daerah dengan cara yang terstruktur dan komunikatif. Peneliti bertindak sebagai mediator yang tidak hanya menyampaikan kebutuhan teknis dan administratif, tetapi juga memberikan pemahaman tentang konteks sosial-ekonomi masyarakat Mamuju yang sangat terdampak oleh keterbatasan infrastruktur. Hal ini penting agar pihak kementerian pusat dapat melihat secara utuh kondisi lapangan dan mempertimbangkan program-program intervensi yang relevan dan tepat sasaran. Selain itu, melalui pertemuan ini, terbuka kesempatan bagi pemerintah daerah untuk

Copyright © 2025 The Author(s)

mengajukan proposal pembangunan yang didukung oleh data dan fakta lapangan yang valid. Peneliti juga membantu dalam penyusunan bahan presentasi dan dokumentasi yang memperkuat posisi pemerintah daerah di hadapan kementerian. Pendekatan yang komprehensif ini mendukung terbangunnya kepercayaan dan sinergi yang lebih erat antara kedua lembaga, sehingga peluang mendapatkan dukungan anggaran dan teknis menjadi lebih besar.

Keberhasilan fasilitasi ini menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas sektor dengan pendampingan yang tepat dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dan mempercepat proses perencanaan serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah. Diharapkan, momentum ini dapat menjadi titik awal bagi percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamuju, yang selama ini mengalami kendala signifikan akibat keterbatasan akses dan sarana fisik. Secara historis, relasi antara pemerintah daerah dan kementerian kerap dibatasi oleh jarak struktural dan administratif. Banyak daerah tertinggal kesulitan mengakses program nasional bukan karena kekurangan ide atau kebutuhan, melainkan karena keterbatasan dalam menjalin komunikasi yang efektif dan strategis. Dalam konteks ini, kehadiran seorang akademisi yang mengambil peran fasilitator berkontribusi pada pelepasan hambatan struktural tersebut. Peneliti tidak hanya mengatur waktu dan tempat pertemuan, tetapi juga membantu menyiapkan narasi komunikasi yang menyampaikan urgensi kebutuhan daerah dalam bahasa kebijakan yang dapat dipahami oleh pejabat kementerian. Pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian PUPR tersebut membahas kemungkinan masuknya program infrastruktur strategis nasional ke dalam wilayah administratif Mamuju. Dalam forum tersebut, Bupati Mamuju secara langsung menyampaikan berbagai persoalan infrastruktur di daerahnya, mulai dari minimnya akses jalan antardesa, jembatan penghubung antarwilayah yang belum layak, hingga kebutuhan mendesak terhadap perbaikan saluran air dan fasilitas publik lainnya. Pejabat kementerian menyambut baik informasi tersebut karena disampaikan secara langsung dan disertai data kontekstual yang konkret. Ini menunjukkan bahwa pendekatan personal dalam diplomasi pembangunan masih sangat relevan dalam konteks Indonesia, di mana birokrasi tetap menempatkan relasi interpersonal sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan(Yuliana, 2020). Lebih dari itu, hasil dari pertemuan ini bukan hanya sekadar janji, tetapi ditindaklanjuti dengan komunikasi lanjutan secara formal melalui pengiriman proposal teknis dan draft program yang disesuaikan dengan format kementerian. Peneliti berperan aktif dalam mendampingi tim pemerintah daerah menyusun materi ini agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa pengabdian masyarakat dapat mengambil bentuk fasilitasi lintas institusi yang bermakna, bukan hanya dalam bentuk kegiatan sosial atau pelatihan berbasis komunitas.



Gambar 2. Rapat Bersama Bupati dengan Kepala Pembangunan Infrastruktur Kementrian PU

Dalam perspektif teologi publik, kegiatan ini mencerminkan konsep pelayanan profetik, yaitu keterlibatan aktif orang percaya dalam proses transformasi sosial dan struktural melalui keterlibatan yang bertanggung jawab dan etis. Tugas profetik ini tidak selalu diungkapkan melalui khotbah atau pernyataan doktrinal, tetapi melalui tindakan nyata dalam ruang publik untuk memperjuangkan kesejahteraan umum(Surbakti, 2019). Fasilitasi ini bukanlah intervensi politik, melainkan bentuk partisipasi etis demi kebaikan bersama, sesuai prinsip *common good* dalam etika Kristen sosial. Lebih jauh lagi, keberhasilan fasilitasi ini menunjukkan bahwa akademisi Kristen dapat menjadi jembatan antara nilai iman dan kebutuhan praktis masyarakat. Peneliti tidak membawa label institusi teologis tertentu, namun kehadiran dan pendekatannya mencerminkan nilai-nilai pelayanan: kehadiran yang rendah hati, kepekaan terhadap penderitaan masyarakat, dan komitmen terhadap keadilan sosial. Dalam hal ini, kehadiran akademisi bukan sebagai instruktur atau pelatih teknis, tetapi sebagai pelayan yang menghidupi nilai-nilai Injil di tengah struktur pemerintahan yang kompleks dan seringkali terjebak dalam rutinitas birokratis. Setelah pertemuan tersebut, terjadi peningkatan intensitas komunikasi antara dinas teknis di Kabupaten Mamuju dengan berbagai direktorat di Kementerian PUPR. Kepala Dinas PUPR Mamuju bahkan melaporkan bahwa arahan yang disampaikan peneliti sangat membantu mereka memahami bagaimana menyusun dokumen usulan proyek yang sesuai dengan pola kerja kementerian. Artinya, fasilitasi ini tidak hanya berdampak pada satu pertemuan saja, tetapi menciptakan efek berantai dalam bentuk kapasitas institusional yang lebih baik dan orientasi kerja yang lebih strategis. Dari hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa fasilitasi tersebut memberi arah baru dalam proses penganggaran dan perencanaan pembangunan di Mamuju. Bukan hanya dalam hal proyek fisik, tetapi juga dalam hal cara pandang pemerintah daerah terhadap strategi pembangunan. Pendekatan ini juga memberikan pelajaran penting tentang pentingnya kolaborasi lintas sektor: antara akademisi, birokrat daerah, dan pembuat kebijakan nasional.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini memperlihatkan bahwa pengaruh seorang akademisi tidak harus melalui pendekatan formal pendidikan atau pelatihan, melainkan dapat diwujudkan dalam bentuk pendampingan strategis yang bersifat praktis dan berdampak jangka panjang. Peneliti telah memainkan peran sebagai juru damai struktural, penghubung nilai, dan fasilitator dialog pembangunan.

2. Pendampingan Teknis kepada Dinas Terkait Pemda Kabupaten Mamuju.

Setelah terlaksananya pertemuan strategis antara Bupati Mamuju dan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tahap selanjutnya dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini difokuskan pada pendampingan teknis kepada instansi pemerintah daerah yang berperan sentral dalam pembangunan infrastruktur, khususnya Dinas PUPR Kabupaten Mamuju. Pendampingan ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan arahan administratif semata, tetapi juga mengarah pada penguatan kapasitas kelembagaan agar lebih optimal dalam menyusun program pembangunan, menyiapkan dokumen teknis yang memenuhi standar, serta meningkatkan kualitas komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Copyright © 2025 The Author(s)



Gambar 3. Memberikan arahan kepada Kepala Dinas PU dan Kepala Dinas terkait Se-Kab. Mamuju.

Salah satu kendala yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah dalam proses perencanaan pembangunan adalah kurangnya kualitas dokumen perencanaan yang diajukan ke kementerian. Sering kali, dokumen tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan, kurang berbasis data lapangan yang akurat, dan tidak selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Akibatnya, banyak program pembangunan yang diajukan mengalami penolakan atau penundaan oleh pihak kementerian, yang pada gilirannya memperlambat proses realisasi pembangunan di daerah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pendampingan ini diawali dengan evaluasi menyeluruh terhadap dokumen-dokumen teknis yang telah disiapkan oleh Dinas PUPR. Peneliti memberikan masukan yang bersifat konstruktif dan sistematis, berfokus pada perbaikan struktur dokumen serta penguatan argumen kebutuhan pembangunan yang lebih jelas dan terukur. Hal ini penting agar dokumen yang diajukan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu meyakinkan pemerintah pusat tentang urgensi dan dampak positif dari program-program yang diusulkan. Selain itu, pendampingan juga mencakup pelatihan dan pembinaan kepada staf teknis dan perencana di Dinas PUPR agar memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme penyusunan dokumen perencanaan yang sesuai standar nasional dan prosedur pengajuan proposal ke kementerian. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kapasitas internal sehingga di masa mendatang, instansi terkait dapat secara mandiri menghasilkan dokumen berkualitas tanpa bergantung pada pihak luar. Di samping aspek teknis, pendampingan juga menekankan pentingnya komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dan pusat. Peneliti mendorong pembentukan mekanisme koordinasi yang rutin dan terstruktur, sehingga informasi mengenai kebutuhan dan progres pembangunan dapat disampaikan dengan baik dan mendapat respon yang cepat. Sinergi yang baik antar lembaga pemerintah ini menjadi kunci untuk mempercepat proses perencanaan hingga pelaksanaan program infrastruktur.

Dalam proses pendampingan, peneliti melakukan pertemuan intensif dengan Kepala Dinas PUPR serta sejumlah kepala dinas pendukung seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Pertemuan ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan reflektif, yang mendorong adanya diskusi terbuka mengenai hambatan yang selama ini dihadapi dalam proses perencanaan dan pengajuan program pembangunan. Hal ini sekaligus menjadi ruang pembelajaran bersama antara akademisi dan pejabat publik dalam membangun strategi teknis yang berkelanjutan dan berbasis konteks lokal. Peneliti menekankan pentingnya keselarasan antara kebutuhan riil masyarakat dan kerangka regulasi kementerian. Dalam hal ini, konsep pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai landasan untuk menilai kelayakan dan keberlanjutan dari program-program yang

akan diusulkan. Ditekankan pula pentingnya dokumentasi yang akurat mengenai kondisi eksisting di lapangan, termasuk data jalan rusak, keterisolasian wilayah seperti Kecamatan Kalumpang, serta aksesibilitas terhadap layanan dasar. Dengan demikian, dokumen yang dihasilkan tidak hanya kuat secara teknis tetapi juga secara argumentatif mampu menunjukkan urgensi intervensi pembangunan.

Selanjutnya, aspek komunikasi strategis kepada kementerian menjadi topik utama dalam pendampingan. Peneliti menjelaskan bahwa dalam sistem pemerintahan Indonesia yang masih sangat birokratis, pendekatan komunikasi yang tepat dan beretika menjadi kunci utama keberhasilan advokasi program. Para pejabat teknis diajak untuk memahami bahwa komunikasi bukan sekadar penyampaian informasi, melainkan bagian dari strategi hubungan antarlembaga yang membutuhkan ketepatan narasi, kejelasan tujuan, dan etika representasi. Dalam hal ini, nilai-nilai dari etika Kristen seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dijadikan sebagai bingkai moral dalam membangun komunikasi birokratik yang sehat(Yustina, 2019). Selama proses pendampingan, juga dilakukan simulasi presentasi program yang dirancang seolah-olah sedang disampaikan kepada pejabat pusat. Tujuannya adalah untuk melatih pola penyampaian yang sistematis dan meyakinkan, serta membangun kepercayaan diri para kepala dinas dalam memperjuangkan program prioritas daerah mereka. Dari sesi ini, ditemukan bahwa beberapa kepala dinas masih memiliki keraguan dalam menyampaikan gagasan karena terbiasa bekerja secara administratif dan kurang terbiasa dengan diplomasi antarinstansi. Oleh karena itu, salah satu capaian penting dari kegiatan ini adalah munculnya kesadaran bahwa membangun program tidak hanya soal teknis, tetapi juga soal membangun narasi yang adil dan berbasis moralitas publik.

Kegiatan ini juga memberi ruang refleksi kritis mengenai praktik pembangunan di tingkat daerah. Peneliti mendorong agar proses pembangunan tidak hanya berorientasi pada angka dan volume proyek, melainkan juga menyentuh dimensi kemanusiaan. Dalam diskusi, diangkat isu mengenai kesenjangan antara desa-desa di Kecamatan Kalumpang dan pusat kota Mamuju. Keterisolasian Kalumpang selama bertahun-tahun menjadi simbol ketimpangan pembangunan yang perlu disikapi dengan kepekaan sosial dan spiritual. Oleh karena itu, pemilihan Kalumpang sebagai daerah fokus kunjungan bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bentuk simbolis dari pentingnya membangun dari pinggiran(Widiastuti, 2020). Sebagai hasil dari pendampingan ini, sejumlah dokumen yang sebelumnya dinilai lemah akhirnya berhasil diperbaiki dengan lebih sistematis. Bappeda dan Dinas PUPR Kabupaten Mamuju berhasil menyusun ulang proposal pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang disesuaikan dengan peta kebutuhan lokal dan arah pembangunan nasional. Bahkan, beberapa dokumen tersebut langsung diajukan kembali kepada Kementerian PUPR dengan dukungan argumentasi yang lebih kuat. Ini menjadi contoh nyata bahwa sinergi antara akademisi dan pemerintah daerah dapat menghasilkan perbaikan tata kelola pembangunan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain aspek teknis dan komunikasi, peneliti juga berupaya membangun komitmen moral kolektif di antara para pemangku kebijakan. Disampaikan bahwa pembangunan bukan hanya soal hasil fisik yang dapat dilihat, tetapi juga proses yang harus dijalani dengan kejujuran, pengabdian, dan tanggung jawab sosial. Dalam kerangka teologi Kristen, pembangunan dilihat sebagai bentuk partisipasi manusia dalam karya penciptaan Allah yang terus berlangsung, dan karena itu harus dijalani dengan hati yang melayani dan motivasi yang murni(Simanjuntak, 2020). Kesadaran etis ini penting sebagai landasan bagi para pemimpin daerah untuk tidak sekadar menjalankan fungsi birokrasi secara prosedural, tetapi juga menghadirkannya sebagai pelayanan yang

Copyright © 2025 The Author(s)

bermakna bagi kesejahteraan bersama. Dalam konteks pembangunan, spiritualitas dan moralitas Kristen tidak hanya menjadi inspirasi pribadi, melainkan perlu diwujudkan dalam keputusan-keputusan publik yang adil, inklusif, dan berpihak pada kelompok rentan. Oleh karena itu, pembangunan yang dilandasi oleh iman harus pula memperhatikan integritas dalam pengelolaan anggaran, kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat pinggiran, serta keterbukaan dalam menjalin kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, proses pembangunan tidak hanya menghasilkan output fisik, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keadilan dan kasih yang menjadi inti dari visi pelayanan Kristen di ruang publik.

**2. Observasi Infrastruktur di Kecamatan Kalumpang**

Kecamatan Kalumpang, yang terletak di wilayah terpencil Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, masih menghadapi tantangan serius dalam pembangunan infrastruktur dasar. Berdasarkan hasil observasi selama pendampingan program, ditemukan bahwa akses terhadap jalan raya yang layak masih sangat terbatas. Jalan-jalan penghubung antar desa sebagian besar belum diaspal, rusak berat saat musim hujan, dan sering kali tidak dapat dilalui kendaraan bermotor. Tidak hanya jalan, jembatan-jembatan kecil yang menjadi penghubung vital antarwilayah juga mengalami kerusakan atau bersifat semi permanen. Kondisi ini berdampak langsung pada mobilitas masyarakat, pengangkutan hasil bumi, serta distribusi logistik kebutuhan pokok. Minimnya infrastruktur yang memadai di Kalumpang bukan hanya menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga membatasi akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan. Misalnya, beberapa warga di dusun-dusun terpencil harus menempuh perjalanan lebih dari dua jam berjalan kaki atau menumpang kendaraan roda dua untuk mencapai pusat pelayanan kesehatan atau sekolah dasar. Situasi ini mencerminkan adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah pusat kabupaten dengan kecamatan-kecamatan pinggiran.



Gambar 4. Bersama Kepala Desa Kalumpang meninjau Bantaran Sungai di Kalumpang.

Dalam konteks pembangunan daerah, kondisi yang ditemukan di Kalumpang memperlihatkan bahwa pendekatan pembangunan selama ini belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil masyarakat. Sering kali prioritas pembangunan didasarkan pada pertimbangan politik atau keterjangkauan geografis yang lebih mudah, sementara daerah-daerah seperti Kalumpang tetap tertinggal. Padahal, menurut prinsip keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan, daerah-daerah yang secara infrastruktur masih tertinggal justru perlu mendapatkan perhatian khusus dan prioritas alokasi anggaran yang lebih besar. Lebih lanjut, kondisi infrastruktur di Kalumpang memperlihatkan kurangnya perencanaan yang bersifat partisipatif dan berbasis data. Hasil diskusi dengan beberapa tokoh masyarakat dan aparat desa menunjukkan bahwa mereka jarang dilibatkan secara langsung dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Hal ini

berakibat pada tidak terakomodasinya kebutuhan mendesak masyarakat dalam dokumen perencanaan tahunan seperti Musrenbang kecamatan maupun kabupaten. Padahal, pelibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan dan relevansi program pembangunan.

Dari sisi tata kelola, dibutuhkan sebuah kerangka koordinasi yang lebih integratif antara pemerintah daerah kabupaten dan perangkat kecamatan dalam menyusun peta jalan pembangunan infrastruktur. Penggunaan data berbasis observasi lapangan seperti yang dilakukan dalam kegiatan ini dapat menjadi salah satu pendekatan untuk menyusun prioritas pembangunan yang faktual dan tidak semata-mata berdasarkan proposal atau pendekatan normatif. Pemerintah daerah perlu membangun sistem pemantauan dan evaluasi infrastruktur yang berbasis indikator kebutuhan masyarakat, misalnya indeks kesulitan akses jalan, waktu tempuh warga terhadap layanan dasar, atau kerusakan fasilitas umum yang terdokumentasi. Selain itu, pendanaan pembangunan infrastruktur di Kalumpang tidak bisa hanya mengandalkan dana APBD Kabupaten. Diperlukan sinergi dengan pemerintah provinsi maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), khususnya dalam hal intervensi teknis dan alokasi anggaran infrastruktur strategis. Hal ini sejalan dengan hasil fasilitasi yang telah dilakukan dalam pendampingan kepada pemerintah daerah, yakni mendorong pemerintah kabupaten agar lebih aktif menyusun proposal pembangunan dan menghadirkannya dalam forum-forum lintas kementerian di tingkat pusat. Perlu dicatat bahwa pembangunan infrastruktur bukan sekadar membangun jalan atau jembatan secara fisik, tetapi juga menyangkut pemberdayaan masyarakat dalam prosesnya. Di beberapa titik, masyarakat Kalumpang menunjukkan semangat gotong royong yang tinggi, termasuk dalam perbaikan jalan darurat dan pembangunan fasilitas kecil secara swadaya. Potensi ini seyogianya dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dengan menyediakan program padat karya berbasis infrastruktur desa, sehingga selain membangun akses, kegiatan tersebut juga berdampak pada peningkatan ekonomi lokal.

Kondisi Kalumpang juga menjadi cerminan dari tantangan pembangunan di daerah pinggiran lainnya di Indonesia. Salah satu akar persoalan keterbelakangan infrastruktur di daerah tertinggal adalah lemahnya integrasi perencanaan lintas sektor dan rendahnya kapasitas birokrasi lokal dalam menyusun dokumen teknis perencanaan yang dapat bersaing di tingkat nasional(Rahmanda, 2022). Oleh karena itu, pendampingan teknis dalam bentuk asistensi penyusunan rencana pembangunan dan pelatihan bagi aparat pemerintah kecamatan dan desa menjadi sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan yang tepat sasaran. Selain itu, dari sisi kebijakan, pemerintah pusat perlu menerapkan afirmasi khusus untuk kecamatan-kecamatan seperti Kalumpang dalam program-program strategis nasional, seperti program peningkatan konektivitas wilayah atau revitalisasi desa tertinggal. Pemerataan pembangunan di Indonesia memerlukan strategi diferensiasi spasial, di mana intervensi untuk wilayah tertinggal disesuaikan secara kontekstual dan berorientasi pada keadilan struktural(Rizkina et al., 2025).

Copyright © 2025 The Author(s)



Gambar 5. Meninjau Jembatan di Kecamatan Kalumpang.

Dengan demikian, hasil observasi lapangan ini tidak hanya menjadi dasar rekomendasi teknis kepada dinas-dinas terkait di Kabupaten Mamuju, tetapi juga menjadi masukan strategis dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu menerjemahkan hasil observasi menjadi dokumen perencanaan yang valid, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

**3. Refleksi Etis Teologi Kristen dalam Pelayanan Publik**

Seluruh rangkaian kegiatan pengabdian di Kabupaten Mamuju, khususnya dalam fasilitasi dan pendampingan pemerintah daerah, tidak hanya mengandalkan pendekatan teknokratis atau administratif, tetapi lebih dalam dari itu: kegiatan ini berpijak pada nilai-nilai etis dan spiritual yang berakar dari iman Kristen. Nilai-nilai keadilan, pelayanan, dan kasih yang menjadi pilar dalam ajaran Kristiani menjadi fondasi utama dalam setiap langkah kegiatan. Dalam konteks inilah, pengabdian masyarakat tidak dimaknai semata sebagai kewajiban akademik atau prosedural, tetapi sebagai bentuk nyata dari kesaksian iman di tengah dunia publik dan birokrasi pemerintahan. Salah satu nilai sentral yang diangkat dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah prinsip pelayanan sebagai panggilan, bukan sebagai kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi. Dalam tradisi Kristen, pelayanan bukanlah arena dominasi kekuasaan, melainkan bentuk kerendahan hati untuk hadir di tengah sesama dan mendampingi mereka dalam perjuangan hidupnya(Purnomo, 2019). Hal ini sejalan dengan model kepemimpinan yang melayani (servant leadership), sebagaimana diteladankan oleh Yesus Kristus. Dalam Yohanes 13, Yesus membasuh kaki para murid sebagai simbol bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang rela menjadi pelayan bagi yang lain. Prinsip ini menjadi inspirasi dan pedoman utama selama proses fasilitasi pendampingan kepada pemerintah daerah.

Dalam dinamika birokrasi daerah, pendekatan yang dibangun oleh tim pengabdian adalah pendekatan non-formal namun tetap menjaga etika dan integritas. Strategi ini penting dalam membangun relasi yang setara dan menghindari kesan relasi kuasa. Pendekatan informal yang dilakukan dalam diskusi-diskusi dengan Bupati, Kepala Dinas, maupun staf teknis, tetap dilandasi sikap hormat dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, komunikasi yang dibangun tidak bersifat instruktif dari atas ke bawah, melainkan dialogis dan partisipatif. Pendekatan ini menjadi cerminan penerapan prinsip Kristen tentang relasi yang setara di hadapan Allah dan sesama. Lebih dari itu, keberadaan tim pengabdian dalam ruang-ruang birokrasi diharapkan membawa pengaruh positif yang menyegarkan sebagai saksi nilai-nilai etis yang sering kali terpinggirkan dalam praktik pemerintahan yang pragmatis. Misalnya, ketika dalam suatu rapat koordinasi muncul ketegangan antar instansi terkait pembagian anggaran, peran

fasilitator adalah menjaga agar proses diskusi tetap berlangsung dalam suasana saling menghargai. Nilai kasih dan keadilan ditampilkan bukan dalam bentuk retorika keagamaan, tetapi melalui sikap konsisten untuk menjunjung transparansi, kejujuran, dan keadilan prosedural. Ini merupakan perwujudan dari etika iman yang tidak terpisah dari urusan publik.

Kehadiran orang percaya dalam ruang publik seharusnya menjadi garam dan terang yang berarti memberi rasa dan arah dalam struktur sosial yang kerap kehilangan integritas. Artinya, etika Kristen tidak berhenti di gereja atau mimbar, tetapi harus berinkarnasi dalam kebijakan, keputusan, dan praktik sosial yang adil dan berpihak pada yang lemah. Dalam konteks Kabupaten Mamuju, pendampingan terhadap pemerintah dalam hal infrastruktur menjadi contoh nyata bagaimana pelayanan iman diterjemahkan dalam kerja konkret yang berdampak sosial. Lebih jauh, refleksi teologi Kristen dalam pelayanan publik juga menegaskan pentingnya keadilan struktural. Dalam hal ini, keadilan bukan sekadar soal pembagian yang merata, tetapi lebih dalam lagi: bagaimana sistem pemerintahan menciptakan akses yang setara bagi semua lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Ketika tim pengabdian mendorong agar pertemuan dengan Kementerian PUPR mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur di daerah terisolasi seperti Kecamatan Kalumpang, maka itu merupakan bentuk keberpihakan yang dilandasi nilai iman. Iman Kristen yang hidup harus mampu mengkritisi struktur sosial yang tidak adil dan secara aktif membela mereka yang tertinggal. Namun, selain berfungsi sebagai perwujudan kasih, pengabdian ini juga memiliki dimensi kenabian, yaitu menyuarakan suara yang tertindas dan membongkar ketimpangan. Dalam konteks birokrasi yang sering kali terseret arus kepentingan politik atau ekonomi, suara etis-teologis menjadi penyeimbang. Akademisi Kristen dapat berperan sebagai nabi zaman modern yang tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga menawarkan solusi transformatif yang berakar dari ajaran Kristus.

Pelayanan publik dalam terang iman tidak boleh dikendalikan oleh ambisi atau kepentingan kelompok tertentu. Sebaliknya, harus didasarkan pada kerelaan untuk mengutamakan kepentingan bersama. Dalam konteks ini, pengabdian masyarakat bukan sekadar menjalankan program, tetapi menjadi arena untuk mempraktikkan nilai-nilai Kristiani secara nyata. Pengabdian menjadi saksi iman yang hidup di tengah dinamika kebijakan publik. Ketika aparat pemerintah menyaksikan bahwa akademisi Kristen tidak hanya datang untuk menilai atau mengkritik, melainkan untuk hadir, mendengar, dan terlibat secara setara, maka kepercayaan dan kolaborasi tumbuh dengan lebih sehat. Aspek lain dari refleksi etis-teologis ini adalah pentingnya transformasi hati dalam proses pelayanan. Banyak program pembangunan gagal bukan karena kekurangan dana, melainkan karena kurangnya ketulusan dan komitmen moral dari para pelaksananya(Harefa, 2019). Oleh sebab itu, dalam setiap pertemuan dan dialog, tim pengabdian senantiasa menekankan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kesetiaan pada panggilan publik. Sikap ini menjadi benih-benih perubahan kecil yang dalam jangka panjang dapat membentuk budaya pelayanan yang lebih etis dan humanis.

Dalam pelayanan yang berakar pada iman Kristen, transformasi sosial harus dimulai dari transformasi pribadi. Nilai spiritualitas Kristen harus mewarnai cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam melayani masyarakat luas agar tidak tercerabut dari akar kasih dan keadilan sosial(Masinambow, 2021). Oleh karena itu, pendekatan spiritualitas tidak boleh dianggap sebagai pelengkap, melainkan sebagai fondasi utama dalam setiap intervensi publik yang dilakukan oleh akademisi atau gereja.

Refleksi iman yang muncul selama pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini menegaskan bahwa pelayanan kepada pemerintah daerah tidak hanya sekadar tugas

Copyright © 2025 The Author(s)

administratif atau profesional semata, melainkan merupakan perpanjangan dari misi gereja yang lebih luas. Dalam perspektif teologi Kristen, birokrasi dan kebijakan publik tidak dapat dipandang sebagai ranah yang netral tanpa nilai, melainkan sebagai medan strategis untuk mewujudkan transformasi sosial yang berakar pada nilai-nilai Kerajaan Allah, yakni keadilan, damai sejahtera, dan kasih yang tulus. Kehadiran akademisi Kristen dalam konteks pelayanan publik, terutama sebagai mitra strategis pemerintah daerah, menegaskan panggilan untuk berperan bukan demi kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi sebagai suara yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan sosial. Hal ini mencerminkan spiritualitas pelayanan yang menyeluruh, di mana iman Kristen tidak hanya menjadi dasar keyakinan pribadi, tetapi diwujudkan secara nyata melalui tindakan dan keputusan yang membawa dampak positif bagi masyarakat luas. Dalam konteks ini, pelayanan publik menjadi arena pengamalan etika teologi Kristen secara konkrit. Nilai kasih yang diajarkan tidak hanya diucapkan dalam retorika, tetapi dihidupi melalui sikap dan keputusan yang menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab sosial. Keadilan yang diperjuangkan pun bukan sekadar konsep moral abstrak, melainkan realitas yang diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan yang memperhatikan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang termarjinalkan. Pengabdian yang dilakukan ini membuka ruang reflektif bagi para akademisi dan pelayan publik Kristen untuk merenungkan bagaimana iman mereka dapat terus terintegrasi dalam aktivitas sehari-hari, terutama dalam pelayanan yang berhadapan langsung dengan tantangan sosial dan birokrasi. Dengan demikian, pelayanan ini bukan hanya soal profesionalisme, tetapi juga merupakan kesaksian hidup yang menguatkan keberadaan Kerajaan Allah di tengah dunia yang penuh kompleksitas.

Pelayanan publik yang dilandasi oleh etika teologi Kristen juga menuntut keberanian untuk menghadapi berbagai dinamika dan tantangan, termasuk ketidakadilan dan birokrasi yang kadang berbelit. Namun, melalui kekuatan iman dan prinsip kasih, akademisi Kristen dapat memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan sistem dan kesejahteraan masyarakat. Kesadaran bahwa pelayanan ini merupakan bagian dari panggilan rohani mendorong integritas dan komitmen yang tinggi dalam setiap aspek kerja. Secara keseluruhan, pengalaman pengabdian ini menjadi pengingat penting bahwa iman Kristen harus menjadi sumber kekuatan dan motivasi dalam setiap pelayanan, termasuk di ranah pemerintahan dan pembangunan daerah. Melalui pelayanan publik yang beretika dan berdampak, misi gereja semakin terwujud secara holistik, membawa harapan dan perubahan positif bagi masyarakat luas.

## Simpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui pendampingan strategis di Kabupaten Mamuju menunjukkan bahwa akademisi Kristen dapat berperan signifikan dalam pembangunan daerah. Kontribusi ini diwujudkan melalui model pendampingan personal dan relasional yang berfokus pada fasilitasi komunikasi dan penguatan jaringan antara pemerintah daerah dan Kementerian PUPR. Model ini terbukti efektif dalam mengatasi kendala struktural daerah seperti keterputusan jaringan koordinasi yang mana tidak dapat diselesaikan hanya dengan pelatihan teknis konvensional. Pendampingan ini menampilkan dimensi spiritual yang khas: menjadikan pelayanan publik sebagai aktualisasi iman Kristen yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kasih. Integrasi etika teologis dengan profesionalisme akademik ini memperkuat peran akademisi sebagai mitra strategis yang berlandaskan moral dalam tata kelola publik. Hasil ini membuka ruang bagi keterlibatan praktisi teologi dalam pembangunan yang inklusif dan bermartabat. Disarankan agar model pengabdian yang berbasis relasi dan advokasi

strategis ini dikembangkan lebih lanjut dalam format tim lintas disiplin. Kolaborasi ini akan menyinergikan dimensi etis-spiritual dengan kemampuan teknis dan manajerial, menghasilkan pelayanan yang utuh dan berdampak luas. Institusi Kristen didorong untuk mendukung penuh model ini, menjadikan pengabdian masyarakat sebagai ekspresi nyata dari iman yang hidup dan berpihak pada pemulihan sosial.

## Referensi

Fitriani, E. (2021). Tantangan Pemerintah Daerah dalam Percepatan Infrastruktur Wilayah Tertinggal. *Jurnal Administrasi Publik*, *18*(2), 233–245.

Harefa, J. (2019). *Teologi Sosial dan Keadilan Struktural dalam Konteks Indonesia Kontemporer*.

Jürgen Moltmann. (1993). *The Church in the Power of the Spirit: A Contribution to Messianic Ecclesiology*.

Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*.

Masinambow, Y. (2021). Transformasi Pendidikan Kristen dalam Konteks Kebangsaan Indonesia. *EDULEAD: Journal of Christian Education and Leadership*, *2*(1), 120–136.

Michael Kinnamon & Brian Cope. (1997). *The Ecumenical Movement: An Anthology of Key Texts and Voices*.

Purnomo, T. (2019). *Etika Iman Kristen dalam Dunia Publik: Antara Kesaksian dan Transformasi Sosial*.

Rahmanda, A. R. (2022). TATA KELOLA DAN TANTANGAN PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH DI INDONESIA. *URNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI*, *12*(2), 176–192.

Rizkina, A., Siregar, S., Lubis, N. H., & Isfa, F. (2025). *Pentingnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi dalam Meningkatkan Kesejahtaraan Masyarakat Indonesia*. *5*.

Sihombing, L. (2021). *Kolaborasi Akademisi dan Pemerintah dalam Pembangunan Daerah*.

Simanjuntak, D. (2020). *Etika Pelayanan Publik dalam Perspektif Teologi Kristen*.

Surbakti, P. (2019). *Etika Kristen dalam Praktik Publik: Telaah Teologi Sosial Kontekstual*.

Widiastuti, L. (2020). *Pembangunan dari Pinggiran: Pendekatan Sosial-Kultural dalam Tata Kelola Daerah*.

Yuliana, D. (2020). *Peran Komunikasi Antar Pribadi dalam Birokrasi Pembangunan di Indonesia*.

Yustina, M. (2019). *Etika Kristen dalam Administrasi Publik*.